

**TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN
MANAJEMEN DAN KUALITAS APARAT KAMPUNG TERHADAP PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pemerintahan Kampung
Di Kabupaten Boven Digoel)**

Penulis:
Arius Kambu¹
ariusk16@gmail.com

Abstract

The researcher is to describe the transparency of village financial reporting based on external pressure variables, environmental uncertainty, management commitment and the quality of village officials. Meanwhile the research approach uses case studies with information gathering through field observations, interviews, document studies and empirical works. While the informants and research were village officials and community leaders and village intellectuals. The findings of the research on financial reporting transparency identified that external pressure variables, environmental uncertainty, management commitment, and the character of village officials were still the inhibiting variables in voicing the principle of transparency in village financial reporting. Another finding is that there is no conformity in village financial management with a summary of law no. 33 of 2004.

Keywords: Transparency, External Pressure, Environmental Uncertainty, Management Commitment and Quality of Village Officials

PENDAHULUAN

Titik sorotan pasal 66 ayat 1 dalam (Undang-Undang No. 33 tahun 2004) menyebutkan keuangan daerah dikelola dengan memperhatikan prinsip efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan selalau memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, berbagai media menyebutkan masyarakat sangat berharap dengan adanya sistem otonomi daerah ini selain bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat, juga dapat menciptakan ruang bagi warga untuk mengambil bagian dalam proses membangun transparansi keuangan kampung.

Menurut (Stiglitz, Joseph E. 1999) ini sesuai dengan sistem negara demokratis, bahwa rakyat memiliki hak dasar untuk mengetahui (*basic right to know*) dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan yang penting adalah alasan yang mendasari suatu kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah.

¹ *Dosen Jurusan Manajemen FEB UNCEN*

Transparansi mulai dikampanyekan beberapa pemerintahan daerah, ini bisa dilihat dari peembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang transparansi. Sedangkan bila dilihat lebih jauh seperti yang dipublikasikan dalam media *online radarbanten.com* memberikan informasi berkaitan dengan transparansi yang sudah lebih dulu disuarakan kurang lebih 12 (dua belas) kabupaten dan kota yang sudah membukukan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat sebagai syarat utama.

Mereka yang melakukan peraturan daerah tentang transparansi termasuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara umum menjabarkan keterbukaan informasi sebenarnya dikeluarkan setelah beberapa Pemerintah Daerah telah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi publik.

Penelitian empiris mengenai transparansi pengutaraan keuangan Pemerintah Daerah yang dikaitkan dengan ketidak pastian lingkungan banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian dari (Sukhemi 2011) Tingkat pengungkapan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi keuangan daerah.

Menurut (Johannes Sihaloho Dan Raja A.S.S Supriono 2013) variabel Ketidakpastian Lingkungan (X_2) tidak memiliki pengaruh tentang Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. (Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki 2012) yang mengatakan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan tidak memberikan nilai yang berarti menuju penetapan transparansi pelaporan keuangan.

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim sekali karena kebanyakan Pemerintah Daerah masih lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada rakyat luas. (Mardiasmo 2006) menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah yang saat ini terjadi harus lebih horizontal, di mana Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan atas DPRD dan masyarakat luas (*dual horizontal accountability*).

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak terjadi keseimbangan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana, sehingga hak rakyat untuk mengetahui (transparansi) mengenai pengelolaan dana tidak terpenuhi. Dalam rakyat demokratis, rakyat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan

dapatkan informasi apa yang sedang dilakukan pemerintah dan mengapa sesuatu dilakukan dengan cara tertentu (Stiglitz, 1999).

Rendahnya transparansi publik akan memiliki dampak negatif yang sangat luas dan dapat membahayakan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul karena kurangnya transparansi dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya, menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, menumpuhkan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, khususnya di lingkungan organisasi sektor publik.

Kualitas pelaporan akuntansi dan pada tingkat Pemerintah Daerah memburuk. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah Pemberitaan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status dan penafsiran yang tidak wajar justru semakin naik.

Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 mencapai dua puluh satu wilayah dan tahun lalu tinggal delapan wilayah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada 2004 mencapai 249 daerah, naik menjadi 283 di 2007, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara 2008.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa adapun ketidak sesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambatnya menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan pelaporan tidak didukung oleh SDM yang memadai.

Dalam (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) mengenai Keuangan Negara serta UU/32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya nyata untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah, yang sudah secara jelas menjelaskan pemerintah di daerah maupun pusat secara rutin menyampaikan informasi pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang sejalan dengan PP/24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Siklus pelaporan keuangan Pemerintah Daerah biasanya menunggu pelaporan audit BPK barulah bisa disampaikan kepada DPR baik Provinsi maupun Kabupaten dan masyarakat umum. Informasi keuangan yang ditunjukkan meliputi empat bagian yaitu: laporan realisasi anggaran, Neraca. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berkait dengan akuntabilitas, maka *Governmental Accounting Standard Board* (1999) memberikan definisi yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari sebuah program atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk penjelasan atas pengumpulan dan penggunaan sumber daya.

Pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dengan memberikan informasi tentang hasil-hasil yang dicapai merupakan sebuah elemen inti dari layanan prima adalah tata kelola pemerintahan baik (*good governance*) seperti yang tertuang dalam *Governmental Accounting Standard Board* (1999).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan maka tujuan penelitian meliputi: (1) Mendeskripsikan tekanan eksternal terhadap praktek transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung di Kabupaten Boven Digoel.; (2) Mendeskripsikan ketidakpastian lingkungan menuju implementasi transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung; (3) Mendeskripsikan komitmen manajemen terhadap implementasi transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung dan (4) Mendeskripsikan kualitas aparat kampung menuju implementasi transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung.

Pengertian akuntabilitas publik yang disadurkan dari pendapat Mardiasmo, (2004) menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban mutlak para pemegang amanah untuk memberikan informasi dalam bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan membuka semua acara dan kegiatan sebagai tanggung jawabnya kepada para pihak yang sudah memberikan kepercayaan pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas untuk pengelolaan dana kepada kompetensi atau wewenang yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) akuntabilitas kepada public.

Keagenan dalam teori agensi (*agency theory*) yang diambil dari Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perusahaan adalah ajakan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya (pokok) dan manajer (agen) yang mengelola penggunaan dan kontrol atau pengawasan sumber daya ini.

Teori keagenan dimunculkan sebagai satu titik masuk untuk menjelaskan tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda akan memunculkan konflik karena pimpinan organisasi cenderung mengejar target

jangka pendek dari pada memaksimalkan kemaanatan dari sebuah program pada lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Secara umum laporan keuangan memuat dua aspek utama yaitu aspek yang berkaitan penyediaan dan pengiriman informasi keuangan. Aspek-aspek utama biasanya berkaitan peraturan termasuk di dalamnya standar akuntansi yang digunakan. Penjelasn ini juga bisa memberikan satau simpulan laporan keuangan merupakan satu elemen kecil dalam penyampaian informasi.

Unsur-unsur penting pelaporan keuangan sebut saja (a) akuntabilitas; (b) Manajemen; (c) Transparansi; dan (d) keseimbangan, merupakan elemen utama yang melekat dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi berkaitan dengan capaian-capaian apa saja yang sudah dilakukan serta apa saja kendala-kendala implementasi di lapangan.

Merujuk ke PP/24/2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan tentang informasi keuangan utama atau pokok yang harus disediakan Pemerintah Daerah meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Aliran Kas, dan (4) Perhitungan Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini, mensyarakat mutu sumber daya manusia adalah kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan penyediaan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Keterbukaan dibangun atas dasar aliran informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, institusi dan informasi wajib dapat diakses oleh pihak-pihak terkait dan informasi diberikan harus dipahami dan dipantau. Terciptanya arus informasi membutuhkan keterlibatan semua Lembaga terkait atau pihak yang memiliki kepentingan sebab informasi dapat dipantau seberapa baik karena transparansi terbentuk atas dasar informasi.

Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu : Menurut (Nico Andrianto 2007) yang secara garis besar menjelaskan transparansi adalah keterbukaan secara komprehensif mengelola sumber daya publik. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi didasarkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari tahu secara terbuka dan komprehensif tentang pertanggung jawaban pemerintah.

Tekanan eksternal menurut (Ferry Roen 2011) yang mengutip pendapat Meyer dan Scott (1983) disadurkan Donaldson (1995), tentang tekanan meliputi kekuatan sosial, dapat menekan organisasi pemerintah untuk melengkapi dan menyelaraskan struktur, organisasi dalam penjelasan diatas diharapkan melakukan kompromi dan menyelaraskan struktur terpisah secara operasional, hal ini dilakukan karena organisasi tidak selalu ditentukan lingkungan tugas melainkan juga ditentukan oleh situasi masyarakat yang didalamnya termuat aspek legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Menurut (Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki 2012) isomorfisme koersif terkait segala hal yang secara otomatis menyatu dengan lingkungan di sekitar organisasi. Tekanan formal dan informal yang diakibatkan dari Isomorfisme koersif (*coervive isomorphism*) yang menyebabkan organisasi akan mengantungkan harapan kepada budaya masyarakat untuk menjalankan fungsinya. (**Dinaggio dan Powell, 1983**). Masih di dalam **Dimaggio dan Powell (1983)** menyampaikan bahwa isomorfisme koersif lahir dari efek politik dan kebutuhan akan legitimasi.

Perubahan yang terpengaruh lebih banyak organisasi politik akan menghasilkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, terutama terkait dengan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan hanya akan menjadi formalitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi.

Ketidak pastian dalam catatan (Miliken 2007) memberikan pendapatan secara umum berkaitan dengan ketidak pastian diartikan sebagai ketidak mampuan orang personal dalam memprediksi sesuatu secara akurat. Secara individu orang mengalami ketidakpastian karena secara individu dirasakan tidak mamiliki informasi cukup untuk memprediksi secara akurat. Persoalan tersebut muncul sebagian besar karena keterbatasan data yang relevan.

Meminjam catatan komitmen manajemen (Hendry 2010), (Robbins dan Judge 2007) memberikan pendapat secara umum bahwa setiap orang perorang dalam organisasi mempunyai keterikatan yang kuat yang membuat mereka selalu memihak pada organisasi dan juga mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Tingkat kesukaan yang tinggi terhadap organisasi juga merupakan unsur terpenting untuk menjelaskan arti komitmen seseorang dalam melakukan segala upaya dengan seluruh kemampuan terbaik yang dimiliki untuk kepentingan mencapai tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Memilih pendekatan kualitatif, sebab pendekatan kualitatif dapat mengungkapkan implikasi yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis informasi serta mendeskripsikan fenomena.

Pendekatan kualitatif menurut Robert K. Yin (2009) menjelaskan penelitian studi kasus tepat digunakan pada penelitian untuk memecahkan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terhadap sesuatu fenomena yang menjadi focus untuk diteliti”. Lebih lanjut (Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman 2007) menyatakan: “Studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu obyek, tumpuan atau suatu peristiwa tertentu”.

Berdasarkan pendapat di atas studi kasus adalah replika penelitian yang dipilih oleh penulis. Ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan kampung yang dilihat dari aspek tekanan eksternal, aspek ketidakadilan lingkungan, aspek komitmen manajemen dan aspek kualitas aparat kampung.

Di atas, studi kasus adalah model penelitian yang dipilih oleh penulis. Ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran umum

Pengumpulan data studi kasus dalam bentuk dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi. Untuk itu prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Observasi.** Observasi dalam penelitian ini adalah observasi berpartisipasi (*participatory observation*), Peranan penulis dalam observasi adalah pemeran serta sebagai pengamat. Observasi berpartisipasi ini adalah mengamati dan mendengar secara secermat mungkin sampai interaksi sosial masyarakat.
- 2. Wawancara.** Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan cara yang utama untuk mengumpulkan data. Menurut (Bogdan 1980) wawancara adalah percakapan yang disengaja, biasanya antara dua orang yang diarahkan oleh seorang dengan tujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan prinsip dialog, diskusi untuk membangun pemahaman dan makna dalam menyelesaikan masalah. Menurut Bogdan wawancara bisa dilakukan Bersama dengan observasi pelibatan (partisipasi), analisis dokumen, atau teknik-teknik lain.

- 3. Dokumentasi.** Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. dokumentasi berupa foto, gambar, bagan, struktur dan catatan yang diambil dari subjek penelitian. Menurut (Moleong Lexy 2000) dokumen bisa digunakan sebagai sumber data dan dapat dimanfaatkan sebagai pembuktian, menafsirkan, dan memaknai suatu peristiwa.

Tehnik Analisis data oleh (Bogdan dan Biklen 1982) diartikan sebagai proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan skrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi serta informasi lain untuk mendalami pemahaman tentang fokus penelitian, baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan penelitian.

- 1. Reduksi Data.** Menurut (Miles & Huberman 1994), reduksi data adalah proses memilih, fokus, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam tulisan catatan lapangan atau transkripsi. Reduksi data terjadi terus- menerus sepanjang penelitian.
- 2. Display Data.** Menurut Miles & Huberman (1994) display data adalah perakitan, pengorganisasian atau kompresi informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Display data dapat membantu untuk mendalami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman.
- 3. Kesimpulan.** Tahap ketiga kegiatan analisis adalah kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif memiliki keteraturan pola, penjelasan, konfigurasi dan sebab akibat.

Validasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, memberi *chek, audit trait, dan expert opinion*. Pengamatan kembali dilakukan sebagai bagian dari validasi informasi atau mencari keabsahan informasi dalam bentuk opini yang diperoleh dalam bentuk pengamatan dan wawancara dengan informasi atau sumber utama yang pernah ditemukan serta mencari kebenaran informasi kepada orang baru yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui perpanjangan pengamatan ini berarti bahwa hubungan peneliti dengan sumber daya akan dibangun saling percaya sehingga tidak ada informasi yang akan disembunyikan.

HASIL PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang perencanaan partisipatif masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Boven Digoel, pada bagian ini akan diberikan uraian mengenai variabel partisipatif berdasarkan hasil wawancara dalam proses penyusunan rencana pembangunan kampung dengan para informan akan diuraikan pada pembahasan sebagai berikut:

Tekanan Eksternal dan Transparansi Keuangan. Tekanan eksternal merupakan gambaran mengenai satu persoalan tersendiri yang dihadapi organisasi tingkat kampung. Di masa otonomi daerah saat ini tekanan eksternal hadir untuk menekankan setiap penyelenggaraan organisasi tingkat kampung transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting.

Meminjam catatan (Madiasmo 2002) menjelaskan masyarakat menaruh harapan bahwa otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektivitas mengelola sumber daya daerah regional, meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat dan mengolah dan menciptakan ruang bagi orang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Mengelola sumber daya regional, meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat dan mengolah serta menciptakan ruang bagi orang untuk berpartisipasi dalam proses. Sedangkan (Ashworth 2009), menjelaskan Kekuatan Koersif merupakan tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang menyatakan tekanan eksternal masih merupakan elemen penghambat pengelolaan keuangan tingkat kampung, karena masih rendah fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dengan adanya intervensi secara totalitas dengan mengerakan semua potensi pada tingkat Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah akan menciptakan satu komitmen pemangku kepentingan kekuasaan di daerah yang memiliki kekuatan utama dalam mengawal pengelolaan keuangan tingkat kampung menuju satu titik yaitu kesejahteraan bersama.

Berkaitan dengan penjelasan di atas tentang tekanan eksternal disampaikan oleh (Ashworth et. al 2009) mengatakan bahwa perubahan organisasi berdasarkan kekuatan koersif menyebabkan organisasi mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis.

Berangkat dari tekanan eksternal yang dianggap sebagai satu kunci utama yang menciptakan rasa ketakutan aparat kampung dalam mengelola dana kampung karena ada tekanan politik yang dilakukan

pihak-pihak yang dianggap sebagai kelompok suksesi sebuah perta demokrasi lima tahunan yang juga dianggap sebagai orang dekat top manajemen yang harus dituruti kemauan mereka karena masyarakat tidak mempunyai ruang untuk bersuara atas ketidak adadilan yang sedang dihadapi mereka.

Pedapat yang lain disampaikan (Ferry Roen 2011) yang mengutip pendapat Meyer dengan Scott (1983) dan (Donaldson 1995), tentang tekanan eksternal mengatakan bahwa tekanan eksternal terdiri dari berbagai kekuatan sosial, dapat menekan organisasi pemerintah untuk melengkapi dan menyelaraskan struktur, harus berkompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, melainkan dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat dan tekanan eksternal ini sangat berhubungan dengan teori isomorfisme koersif.

Selanjutnya pendapat Ridha dan (Basuki 2012) isomorfisme koersif selalu terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Tekanan internal dan eksternal organisasi yang biasanya ditimbulkan dari organisasi lain disebut juga dengan istilah isomorfisme yang muncul sebagai bagian dari organisasi menjalankan fungsinya. (Dimaggio & Powell 1983) menyatakan isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi.

Ketidakpastian Lingkungan dan Transparansi Keuangan. Membaca dari berbagai sumber tentang tidak pastian lingkungan secara garis besar para pakar menjelaskan inti atau pengertian yang sama yaitu situasi lingkungan yang dihadapi sulit diprediksi karena ada berbagai faktor yang ikut mempengaruhi proses itu.

Dalam penelitian ini, tidak pastian lingkungan yang dihadapi pemerintahan tingkat kampung adalah tidak pastian yang disebabkan kuatnya intervensi Pemerintah Daerah terkait.

Masyarakat pada tingkat pemerintahan kampung belum terbiasa dengan pola birokrasi serta keterbatasan pendidikan yang menyebabkan pengelolaan keuangan pemerintahan kampung sedikit mengalami hambatan dalam mewujudkan semangat keterbukaan informasi.

Sementara itu pendapat (Milliken 1987) ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi hal-hal secara akurat dari semua faktor sosial dan fisik yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan orang di organisasi.

Sedangkan (Luthans 1998) perubahan lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitarnya sehingga mencoba melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.

Selanjutnya (Fisher 1996) menyebutkan bahwa pada kondisi tidak ketelitian, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuat.

Hasil penelitian memberikan rekaman data berkaitan dengan partisipasi publik dalam proses perencanaan penyusunan program dan kegiatan kampung yang pembiayaannya bersumber dari dana kampung masih menunjukkan sedikit keterlambatan karena situasi lingkungan kurang mendukung pada tingkat pimpinan antara organisasi terkait karena ada tarikan kepentingan politik yang membuat proses pengambilan keputusan mengalami penyumbatan karena banyak birokrasi yang harus dilewati aparat kampung.

Persoalan-persoalan kepentingan masing-masing organisasi teknis membuat proses penyusunan anggaran sedikit banyak mengalami tidak sesuai antara program dan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dan atau kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kampung tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat sebelumnya.

Berangkat dari persoalan tidak pastian lingkungan sebagai satu kunci utama yang membuat terkuncinya proses penerapan transparansi dalam proses penyusunan keuangan kampung karena tidak pastian lingkungan diluar organisasi pemerintahan kampung, sebutnya keterlambatan penyusunan payung hukum sebagai wadah untuk melindungi aparat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.

Menurut (Mizruchi dan Fein 1999) memberikan penjelasan bahwa Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar dalam bentuk regulasi akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam mentransformasinya menjadi regulasi baru.

Dalam situasi yang tidak menentu, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respons terbaik yang dapat dilakukan adalah meniru organisasi-organisasi yang mereka anggap berhasil.

Pendapat lain yang juga menjelaskan tentang isu ketidakpastian lingkungan dalam proses pengelolaan keuangan kampung secara transparan datang dari Menurut Duncan dalam (Dwi Cahyono 2008) Persepsi ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai persepsi lingkungan yang dihadapi

dan mempengaruhi di tempat karyawan bekerja. Pendapat di atas memberikan gambaran secara umum bahwa perilaku individu selalu berubah mengikuti perkembangan lingkungan yang menyebabkan organisasi selalu harus melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut agar tetap bertahan dalam situasi yang penuh ketidak pastian.

Komitmen Manajemen dan Transparansi Keuangan. Catatan berbagai pakar menjelaskan tema komitmen manajemen menurut situasi dan kondisi yang dipengaruhi budaya lokal masing-masing dalam menjelaskan sebuah komitmen menurut pemahaman lokalitas masing-masing yang pada intinya semua memiliki kesamaan atau kemiripan yang akan melahirkan kebiasaan melakukan segala urusan pada urusanya masing-masing.

Komitmen manajemen tingkat pemerintahan kampung adalah sesuatu yang baru menurut pemahaman masyarakat karena ada perilaku budaya yang dipelihara masyarakat yaitu setiap bantuan keuangan yang diberikan pemerintahan pusat maupun kabupaten kota masih dianggap sebagai dana hibah yang dipakai habis dan tidak perlu ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan tersebut.

Pemikiran-pemikiran tersebut diatas yang masing menghantui pola pengelolaan keuangan tingkat kampung untuk membangun komitmen kolektif secara bersama-sama membentuk satu model manajemen buka buku atau tata kelola keuangan kampung lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah agar tujuan sila ketiga bisa diwujudkannyatakan dalam membangun kemandirian ekonomi kampung.

Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan menurut catatan (Paine 1994) menyatakan bahwa strategi integritas sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada serimonial inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pemerintah yang kuat.

Dalam manajemen tatakelola keuangan kampung sebenarnya sudah ada nilai-nilai budaya yang sangat kuat dipelihara masyarakat namun belum dipahami sebagai bagian dari nilai komitmen manajemen tingkat kampung, sebut saja nilai rasa malu yang merupakan sebuah budaya yang lahir tumbuh dan besar bersama masyarakat kampung dalam mempertahankan jati diri seseorang yang dijaga dengan baik agar

tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan orang kampung pada pemberian status kelas rendah karena melakukan sabotase pada sumber-sumber ekonomi yang bukan merupakan haknya.

Penjelasan-penjelasan sederhana tentang nilai rasa malu sebagai sarana yang paling kuat mempercepat terbentuknya manajemen buka buku atau transparansi pengelolaan keuangan tingkat kampung karena aparat kampung masing-masing hidup dalam jaringan sosial yang terikat sangat kuat.

Hasil penelitian dilakukan berkaitan dengan transparansi pelaporan keuangan kampung, ditemukan masih tersandera oleh kepentingan top manajemen yang menyebabkan masih rendahnya komitmen manajemen memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat.

Persoalan masih rendahnya komitmen manajemen dalam mengawal proses pengelolaan keuangan kampung, mungkin dikarenakan kepentingan politik atau ada proses pembiaran yang dilakukan top manajemen kepada aparat kampung untuk tetap hidup dalam kesederhanaan.

Komitmen manajemen merupakan satu keputusan yang dibuat secara kolektif pada tingkat aparat kampung dengan organ-organ di dalam kampung atau diluar kampung untuk memberikan informasi baik dan benar kepada masyarakat kampung, karena aparat kampung merupakan komponen pemerintah terkecil yang memiliki kewajiban untuk melaporkan program atau kegiatan apa yang sudah dilakukan beserta hasilnya secara sistematis pada suatu periode pelaporan.

Pendapat lain yang menjelaskan tentang komitmen manajemen datang dari (Hendry 2010), (Robbins dan Judge 2007) sebagai situasi di mana seorang individu memihak organisasi dan tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Selanjutnya Sopiah, 2008 yang menulis kembali pendapat Mathis dan Jackson menjelaskan pengertian komitmen organisasi merupakan sebuah titik kunci dimana seorang mau menerima segala kebijakan yang dibuat pimpinan serta tetap tinggal bekerja dalam organisasi walaupun ada tawaran menarik dari organisasi lain.

Komitmen organisasi menurut Sri Kuntjoro, (2002) yang disadurkan kembali dari pendapat Richard M. Steers yang menjelaskan bahwa komitmen itu merupakan nilai kepercayaan diberikan seseorang terhadap organisasi sebagai rasa yang diakibatkan organisasi telah memenuhi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang serta tetap merakan bahwa organisasi itu juga merupakan milik Bersama.

Kualitas Aparat Kampung dan Transparansi Keuangan. Membaca dari berbagai guntingan berita baik pendapat para pakar dan para pengamat tentang tema kualitas kerja aparat kampung titik fokus adalah kualitas pendidikan di wilayah pedalaman papua yang belum baik karena infrastruktur yang disediakan masih sangat terbatas serta jaringan sosial masyarakat yang masih sangat kuat menganut sistem nomaden serta dimanjakan dengan yang di sediaan alam untuk beberapa generasi mendatang.

Semakin derasnya arus uang yang masuk ke tanah papua arusnya semakin tahun semakin deras, namun tidak membuat masyarakat terbangun dari tidur mereka, hal ini dikarenakan jaringan sosial masih teramat sangat kuat melilit pikiran mereka sebagai petani peramu yang selalu memandang anak adalah pencari nafkah keluarga harus selalu berada di lahan-lahan garapan keluarga menanam atau melakukan perburuan hewan-hewan liar untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu yang terpenting ketimbang menuntut ilmu.

Kualitas pendidikan aparat kampung masih sebagai sebuah titik yang membuat tersangkutnya pengelolaan keuangan kampung berdasarkan UU/33/2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, mematuhi hukum dan peraturan dan ayau menyebutkan bahwa pemerintah dikatakan telah memenuhi asas keadilan, kepatuhan dan kemanaatan pengelolaan keuangan dengan baik apabila telah menjalankan prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan norma yang berlaku.

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat kampung yang hampir menyebar pada wilayah penelitian yang hampir pasti merupakan faktor yang memperlambat pengelolaan keuangan kampung secara transparansi mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pengendalian berjalan putus-putus karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka penulis meminjam pendapat Setiawati (2013) dalam (Al-Amin 2015) yang diambil dari studinya Benny Mandala Putra (tanpa tahun) menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kesatuan kemampuan manusia yang ada pada organisasi dan bukan total penjumlahan karyawan yang ada, sebagai kesatuan SDM harus dilihat sebagai suatu sistem di mana setiap karyawan adalah bagian yang saling terkait. Sedangkan pendapat Spencer, (1993) dalam (Saputra 2015). (Fardian 2014) masih dalam studinya Benny Mandala Putra (tanpa tahun) tentang kompetensi menjelaskan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang

ditunjukkan oleh kemampuannya untuk secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau fungsi pekerjaan yang spesifik.

Hasil penelitian memberikan sebuah gambar sebagai petunjuk tentang masih lemahnya tingkat pemahaman masyarakat kampung dalam memaknai atau membaca atau menjelaskan transformasi pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat kampung karena keterbatasan pendidikan dan tingkat pemahaman yang masih rendah sekali.

Redahnya tingkat pendidikan masyarakat pada level aparat kampung serta faktor tidak percayaannya antara aparat kampung membuat transparansi pengelolaan keuangan kampung tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama yaitu kemandirian ekonomi kampung.

Dalam catatan (Hess 2007) tentang transparansi mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terbentuknya tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) biasanya dilihat dari sejauhmana transparansi dan keterlibatan stakeholder sudah sudah sejalan dengan tata kelola pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara Stiglitz, (1999), memberikan penguatan berkaitan dengan hak dijelaskan bahwa masyarakat secara alamiah memiliki hak dasar untuk mengetahui (*basic right to know*) dan memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, dan mengapa itu merupakan kebijakan atau program. Sedangkan dalam catatan Silver, (2005) memberikan satu ketegasan bahwa bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Sedangkan dalam jurnal yang ditulis (Wayan Edi Suparman, Nyoman Trisna Herawati, Edy Sujana 2014) dijelaskan bahwa berdasarkan beberapa pengertian mutu sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibekali dengan pendidikan serta pengalaman yang cukup khususnya dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Widodo, 2001 dalam (Kharis 2010), mengatakan bahwa terwujudnya laporan keuangan yang baik diperlukan mutu sumber daya manusia yang bisa mengaplikasikan logika akuntansi pada pencatatan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Mutu sumber daya manusia merupakan modal utama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan atau bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai untuk membuat pencatatan laporan keuangan.

Pendapat lain yang disampaikan tentang kualitas aparat kampung dalam proses perencanaan sampai pada tahap pengelolaan keuangan kampung masih menjadi isu sentral karena rendahnya kualitas masyarakat akan sangat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan karena catatan-catatan harian yang dibuat sama sekali tidak akan pernah menjawab asas kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengertian Manusia yang disadurkan kembali dari Hasibuan, (2013) menjelaskan manusia merupakan kunci utama dalam factor produksi perlu mendapatkan perhatian istimewa dari organisasi sebab manusia merupakan penggerak utama yang membuat manusia dipandang penting dalam sebuah organisasi.

Transparansi Pelaporan Keuangan Kampung. Transparansi pelaporan keuangan masyarakat kampung di wilayah kabupaten Boven Digoel ketika penyusunan RPJMD sampai dengan RKPK dapat dijelaskan sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit hambatan karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kampung dengan aparat kampung di beberapa wilayah Boven Digoel.

Persoalan-persoalan itu muncul karena belum ada sosialisasi dari pemerintah dengan masyarakat serta keterlibatan kepemimpinan tiga tungku belum di gerakan secara maksimal sebagai sebuah syarat utama dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif sejak pemekaran beberapa kampung di Boven Digoel.

Menurut (Bryan dan White 1990) menyatakan bahwa partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program dapat membangun kemandirian. Selain diusulkan juga bahwa perluasan konsep partisipasi tidak hanya mencakup proses perencanaan dan implementasi, tetapi juga partisipasi dalam menerima manfaat. Aspek menerima manfaat adalah pelengkap bagi ruang lingkup proses perencanaan dan implementasi sehingga dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selanjutnya (Griesgraber dan Gunter 1996) menambahkan ukuran lain yaitu evaluasi. Dengan demikian konsep partisipasi menjadi lebih luas, mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penerimaan manfaat. Ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh (Fasli Djalal dan

Dedi Supriadi 2001) menjelaskan partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat memberikan masukan atau pendapat sebagai penerimaan manfaat dari program atau kegiatan yang akan maupun sudah dijalankan. Partisipasi juga dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Transparansi pelaporan keuangan juga merupakan ukuran yang dipakai juga untuk mengukur kualitas laporan keuangan setiap organisasi baik profit maupun non profit. Sementara itu juga tujuan umum dibuatnya laporan keuangan secara garis besar menurut pendapat para pakar menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai alat pengambilan keputusan yang disampaikan kepada para pengguna untuk membuat pertimbangan yang terkait dengan alokasi sumber daya.

Demikian laporan keuangan juga merupakan alat penyedia informasi tentang besarnya sumber daya yang akan digunakan maupun resiko yang ditimbulkan dari keputusan keuangan dan ketidakpastian yang terkait. Tujuan pelaporan keuangan terpenuhi atau dianggap baik jika telah memenuhi dua aspek penting yaitu transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dan sebaliknya jika dua tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka pencatatan keuangan Pemerintah Daerah bermasalah.

Informasi penambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang aktivitas entitas pelaporan untuk satu periode.

Menurut Rendy Ermino (tanpa tahun) dalam jurnal penelitian menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif tanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan (KK, SAP,2005).

Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka memiliki kriteria sebagai berikut. (1) Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya akses ke laporan keuangan; (3) Publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja dan (4) Kebijakan publik.

Sedangkan ada pendapat lain yang menjelaskan tentang tujuan transparansi pelaporan keuangan datang dari beberapa pakar diantaranya sebut saja Warren Bennis dalam Skripsi (Fierda Shaftratunnisa

2015) mengemukakan bahwa tujuan transparansi, yaitu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan cara melibatkan mereka dalam setiap kegiatan mulai proses perencanaan secara partisipatif sampai dengan tahapan evaluasi kemanfaatan anggaran.

Sedangkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance*, yaitu: a) ketersediaan payung hukum bagi akses informasi publik, b) ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi, c) tercukupi sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik, d) ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik, dan e) kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik.

Selanjutnya Mardiasmo dalam (Simsom Werimon dkk 2007) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu: (1) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedianya anggaran dan dokumen mudah diakses; (3) Tersedianya dokumen pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasinya usulan/suara rakyat; (5) Tersedianya sistem penyampaian informasi kepada publik.

Berangkat dari persoalan belum baiknya keterbukaan informasi antara masyarakat kampung serta masih rendahnya tingkat pendidikan mereka serta masih sangat kuat tekanan-tekanan dari luar yang diarahkan semua pada proses penataan keuangan kampung bersumber dari pusat dan daerah.

Hasil temuan penelitian memberikan satu gambaran sebagai petunjuk tentang masih kuatnya kepentingan masing-masing individu dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat kampung sebagai jalan masuk untuk mengeksplorasi segala sumber-sumber ekonomi yang dimiliki orang kampung.

Bantuan keuangan yang diberikan pemerintah masih belum dipahami secara bersama-sama sebagai satu modal awal untuk membangun kemandirian kampung melalui berbagai infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan mulia yaitu keadilan ekonomi bagi semua masyarakat kampung.

Penelitian ini memberikan sebuah gambar sebagai petunjuk tentang masih lemahnya tingkat pemahaman masyarakat kampung dalam memaknai atau membaca atau menjelaskan transformasi pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat kampung yang lain karena keterbatasan pendidikan dan tingkat pemahaman yang masih rendah sekali.

KESIMPULAN

Dalam pengidentifikasian masalah dilapangan terlihat bahwa masih kuatnya tekanan eksternal dalam proses pelaporan keuangan dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dengan kondisi nyata karena ada berbagai kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan tingkat kampung.

Rekaman data lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tidak pastian lingkungan dalam proses pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pelaksanaan rencana program dan kegiatan tingkat kampung dengan mengusung tema transparansi masih belum secara utuh diterima oleh semua komponen pada tingkatan Pemerintah Daerah sampai pemerintahan tingkat kampung karena masih lemahnya komitmen manajemen pada masing-masing tingkatan.

Dalam pengidentifikasian masalah di lapangan terlihat bahwa masih lemahnya tingkat pendidikan dalam proses penyusunan catatan keuangan menyebabkan penerapan transparansi belum bisa dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashworth et. al. 2009. *"Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector."* By R., G. Boyne., dan R. Delbridge Ashworth. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bogdan, R. C. Biklen. 1982. *Qualitatif Research for Education Theory and Methods*.
- Bogdan. 1980. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. . Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bryan dan White. 1990. *"Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang,."* By C. dan White G. L., Bryan. Jakarta:: LP3ES.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. *American sociological review*, 147-160.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications*. *Academy of management Review*, 20(1), 65-91.
- Dwi Cahyono. 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Progam Mentoring dengan. Kepuasan Kerja dan Niat Ingin Pindah*. Disertasi Universitas. Diponegoro.

- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, *Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang)*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta, Jakarta: Depdiknas Bappenas Adiciptakaryanusa.
- Fierda Shaftratunnisa. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. . Jakarta: Skripsi S-1. Jakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fisher. 1996. "State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy. 2nd Edition." By Ronald C. Fisher.
- Griesgraber dan Gunter. 1996. "Development: New Paradigms and Principle for The Twenty First Century. ." By J.M and B.G Gunter Grisgraber. Pluto Press East Havey, CT.
- Hasibuan, M. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hess, D. (2007). *Social reporting and new governance regulation: The prospects of achieving corporate accountability through transparency*. *Business Ethics Quarterly*, 17(3), 453-476
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360
- Kharis, A. (2010). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia*. *Skripsi tidak diterbitkan*. Surabaya: UPN Veteran.
- Luthans. 1998. "Organizational Behavior. Eigt Edition. New York McGraw-. Hill Co." By Fred. 1998. Luthans. New York.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Milliken, F. J. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. *Academy of Management review*, 12(1), 133-143.
- Mizruchi dan Fein. 1999. "The Social Construction of Organizational. Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative. Isomorphism. Administrative Science Quarterly." By M. S. dan L. C. Fein Mizruchi.
- Moleong Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:: PT, Remaja Rosdakarya.
- Nico Andrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui. E-Government*.
- Paine, L. S. (1994). Managing for organizational integrity. *Harvard business review*, 72(2), 106-117.

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun. 2003. *Tentang Keuangan Negara*. Indonesia, Jakarta: Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 tahun. 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*. Indonesia, Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 2008. "Keterbukaan Informasi Publik." Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun. 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia, Jakarta: Indonesia.
- radarbanten.com. n.d.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. "Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* (Simposium Nasional Akuntansi) xv.
- Robbins dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas*, . Jakarta.: Penerbit Salemba Empat:.
- Robert K. Yin. 2009. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roen, F. (2011). Teori Institusional (Institutional Theory).
- Simsom Werimon dkk. 2007. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). ." *SNA X*. .
- Sopiah, D. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: PT Andi Yogya.
- Stiglitz, Joseph E. 1999. *Economics of the Public Sector. Third edition*. . New York: W.W. Norton & Company.
- Sukhemi. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Telkom, Tbk, Vol.1*. Vol. 1.
- Suparman, W. E., Herawati, N. T., AK, S., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).